



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam pelaksanaan layanan informasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 471, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 809);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora yang terdiri atas:

- a. Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pengarah PPID);
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- d. Tim Pertimbangan, meliputi:
 1. tim pertimbangan bidang kepemudaan;
 2. tim pertimbangan bidang keolahragaan; dan
 3. tim pertimbangan bidang dukungan manajemen.

KEDUA : Susunan personel Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang:

- a. Pengarah PPID
 1. bertanggung jawab memberikan kebijakan strategis terkait layanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 2. berwenang untuk menetapkan kebijakan strategis dan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. Atasan PPID
 1. tanggung jawab:
 - a) membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - b) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik; dan
 - c) mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal terjadi sengketa Informasi.

2. tugas:
 - a) menunjuk PPID pelaksana dan petugas pelayanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b) menyusun arah kebijakan teknis layanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - d) mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan; dan
 - e) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID pelaksana.
 3. berwenang:
 - a) menetapkan PPID pelaksana dan petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b) menetapkan arah kebijakan teknis layanan Informasi Publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d) memberikan persetujuan terhadap usulan Informasi yang akan dikecualikan;
 - e) memberikan persetujuan atas penolakan Permintaan Informasi Publik yang dikecualikan;
 - f) menugaskan PPID untuk mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan; dan
 - g) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik.
- c. PPID
1. tanggung jawab:

melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 2. tugas:
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- d) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- e) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h) mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan;
- i) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- j) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- k) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik;
- l) menjawab permohonan informasi publik;
- m) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan informasi; dan
- n) meminta masukan dari Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana terhadap jawaban penolakan informasi publik.

3. berwenang:

- a) menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d) meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g) menugaskan PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

- h) menugaskan PPID pelaksana untuk membantu dan/atau mewakili PPID dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan; dan
- i) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik.

d. Tim Pertimbangan

tanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan sesuai bidang masing-masing, meliputi antara lain:

- a) memberikan pertimbangan tertulis terkait dengan layanan informasi publik dalam hal diminta;
- b) memberikan pertimbangan atas pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dan hal lain terkait layanan informasi publik; dan
- c) memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

- KEEMPAT** : Atasan PPID, PPID, dan Tim Pertimbangan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora memperoleh honorarium dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran berjalan dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya sampai ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juni 2024

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ARJO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



**Mulyani Sri Suhartuti
NIP. 197303231998032002**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENPORA
(1)	(2)	(3)
1	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah PPID
2	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Atasan PPID
3	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	PPID
4	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Tim Pertimbangan Bidang Kepemudaan
5	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
6	Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	
7	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Tim Pertimbangan Bidang Keolahragaan
8	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	
9	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
10	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Tim Pertimbangan Bidang Dukungan Manajemen
11	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
12	Inspektur	
13	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Tim Pertimbangan Bidang Dukungan Manajemen
14	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	
15	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO